



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)  
**UNIT KERJA** : KEDEPUTIAN BIDANG OPERASI Pencarian dan Pertolongan dan KESIAPSIAGAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EDY PRAKOSO  
2. Jabatan : DIREKTUR OPERASI  
3. NHK : 827348

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.155.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000  
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 238.500.000

1. MOBIL, TOYOTA TOYOTA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000  
2. MOTOR, HONDA HONDA VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000  
3. MOTOR, YAMAHA SEPDA MOTOR YAMAHA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 75.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.750.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.219.000.000

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

**3.219.000.000**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.